

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI INSTRUMEN PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL (STUDI PADA PEMERINTAH DESA SONDO)

Irawansyah¹, Aditiyani Nugraha Pertiwi², Nining Ariani³, Alfisahrin⁴

^{1, 2, 3, 4}Universitas Bima Internasional MFH Mataram, Jl. Medica Farma, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email: irawansyahabbas90@gmail.com

Article History

Received: 09-05-2026

Revision: 03-06-2026

Accepted: 14-06-2026

Published: 30-06-2026

Abstract. This study aims to analyze the accountability of Village Fund management as an instrument for improving local economic development in the Sondo Village Government. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The object of the study is the Sondo Village Government with a focus on the practices of planning, implementation, reporting, and accountability of Village Funds and their impact on community economic activities. The research informants numbered 10 people consisting of the Village Head (1 person), Village Secretary (1 person), Finance Head (1 person), Head of Government/Development Section (1 person), BPD members (2 people), BUMDes managers (2 people), and MSME actors (2 people). Informants were selected using a purposive sampling technique, namely based on the consideration that they have knowledge, experience, and direct involvement in the management of Village Funds and local economic development activities in Sondo Village. Data analysis was carried out using an interactive model through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the accountability of Village Fund management in Sondo Village is in the good category, especially in the aspects of transparency, regulatory compliance, and reporting accuracy. These accountability practices have contributed positively to increasing local economic development, as indicated by an increase in the number of micro-enterprises, improvements in economic infrastructure, and a strengthening of the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes).

Keywords: Accountability, Village Fund, Local Economic Development, Village Governance, BUMDes

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sebagai instrumen peningkatan pembangunan ekonomi lokal pada Pemerintah Desa Sondo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Objek penelitian adalah Pemerintah Desa Sondo dengan fokus pada praktik perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Informan penelitian berjumlah 10 orang yang terdiri atas Kepala Desa (1 orang), Sekretaris Desa (1 orang), Kaur Keuangan (1 orang), Kepala Seksi Pemerintahan/Pembangunan (1 orang), anggota BPD (2 orang), pengelola BUMDes (2 orang), dan pelaku UMKM (2 orang). Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan Dana Desa serta kegiatan pembangunan ekonomi lokal di Desa Sondo. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sondo berada pada kategori baik, khususnya dalam aspek transparansi, kepatuhan regulasi, dan ketepatan pelaporan. Praktik akuntabilitas tersebut berkontribusi positif terhadap peningkatan pembangunan ekonomi lokal, yang ditandai dengan bertambahnya jumlah usaha mikro, perbaikan infrastruktur ekonomi, serta penguatan peran BUMDes. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu desa dengan jumlah informan yang terbatas sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Pembangunan Ekonomi Lokal, Tata Kelola Desa, BUMDes

How to Cite: Irawansyah., Pertiwi, A. N., Ariani, N., & Alfisahrin. (2026). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Instrumen Peningkatan Pembangunan Ekonomi Lokal (Studi pada Pemerintah Desa Sondo). *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (3), 2682-2693. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i3.5599>

PENDAHULUAN

Akuntabilitas pengelolaan dana publik merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks pemerintahan desa, pengelolaan Dana Desa menjadi isu strategis sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam aspek pembangunan ekonomi lokal. Dana Desa berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan peningkatan partisipasi, termasuk kenaikan partisipasi kerja perempuan (Bahri, 2020; Koriyawati et al., 2025; Sanur, 2023).

Kebijakan ini diperkuat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang secara konsisten mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kelembagaan desa. Penyaluran Dana Desa terbukti meningkatkan pembangunan dan indikator ekonomi, termasuk di daerah tertinggal dan perbatasan. Namun, masih ditemukan: partisipasi masyarakat yang belum optimal, transparansi dan akuntabilitas yang lemah, serta kapasitas SDM desa yang terbatas, sehingga manfaat kebijakan pusat tidak selalu maksimal di tingkat desa (Gobel, 2022; Karundeng et al., 2025; Wulandari et al., 2025).

Secara normatif, Dana Desa diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Walau secara regulasi Dana Desa diawasi banyak pihak (BPD, APIP, BPK, KPK, camat, masyarakat), efektivitas kontrol internal di desa sering kurang: transparansi rendah, evaluasi anggaran lemah, laporan tidak rinci, dan akuntabilitas belum terpenuhi (Sugito et al., 2002; Wea & Rahmadhani, 2025). Kapasitas dan implementasi menjadi faktor kunci keberlanjutan pengelolaan Dana Desa, terutama di daerah tertinggal seperti Papua (Warokka et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas aparatur desa, lemahnya sistem pengawasan internal, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aparatur desa belum siap mengelola dana besar: keterampilan keuangan rendah, kesulitan menggunakan aplikasi (SisKeuDes), kesalahan administrasi, dan keterlambatan pelaporan (Jumsar et al., 2025; Sugito et al., 2002; Wulandari & Malau, 2025).

Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakefisienan, penyimpangan anggaran, serta kurang optimalnya dampak terhadap pembangunan ekonomi lokal. Oleh karena itu, akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif dalam pelaporan keuangan,

tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial kepada masyarakat desa sebagai pemangku kepentingan utama. Keterbatasan kapasitas aparatur dan lemahnya pengawasan memicu salah kelola, keterlambatan, hingga potensi korupsi dana desa (Kamila et al., 2021). Berbagai studi menegaskan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban kepada publik, bukan sekadar memenuhi kewajiban pelaporan ke atasan, mencakup aspek hukum, administratif, dan moral-sosial kepada masyarakat sebagai pemberi amanah (Achmad & Suwanda, 2024; Dwirini et al., 1845; Sutanto & Hardiningsih, 2021). Meskipun demikian, kajian yang menghubungkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dengan capaian pembangunan ekonomi lokal masih relatif terbatas. Padahal, Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM, pembangunan infrastruktur ekonomi, dan penguatan kelembagaan ekonomi desa. Keterbatasan penelitian terdahulu dalam menjelaskan dampak nyata akuntabilitas terhadap peningkatan ekonomi lokal menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, tetapi juga sebagai instrumen yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal.

Pemerintah Desa Sondo dalam pengelolaan Dana Desa memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal, seperti pengembangan usaha mikro, pembangunan sarana produksi, dan pemberdayaan kelompok masyarakat. Namun demikian, sejauh mana prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas telah diimplementasikan secara efektif masih memerlukan kajian mendalam. Studi ini menjadi relevan karena pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan mekanisme pertanggungjawaban yang diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sebagai instrumen peningkatan pembangunan ekonomi lokal pada Pemerintah Desa Sondo.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik akuntabilitas pengelolaan Dana Desa serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi lokal di Desa Sondo. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, serta pengalaman para pelaku yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan,

dan pertanggungjawaban Dana Desa, sehingga tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada dinamika sosial dan partisipatif dalam tata kelola pemerintahan desa. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Desa Sondo sebagai locus kajian dalam menilai implementasi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Informan penelitian berjumlah 10 orang yang terdiri atas Kepala Desa (1 orang), Sekretaris Desa (1 orang), Kaur Keuangan (1 orang), Kepala Seksi Pemerintahan/Pembangunan (1 orang), anggota BPD (2 orang), pengelola BUMDes (2 orang), dan pelaku UMKM (2 orang). Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan Dana Desa serta kegiatan pembangunan ekonomi lokal di Desa Sondo.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi terkait mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban Dana Desa, termasuk tingkat transparansi dan partisipasi masyarakat. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program pembangunan desa, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur ekonomi dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, dokumentasi diperoleh dari dokumen resmi desa seperti APBDes, laporan realisasi anggaran, RKPDDes, dokumen pertanggungjawaban Dana Desa, serta notulen musyawarah desa. Untuk meningkatkan validitas data, digunakan teknik triangulasi dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Fokus penelitian ini terdiri atas dua aspek utama, yaitu akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan pembangunan ekonomi lokal. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Sondo dalam mengelola Dana Desa secara transparan, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indikator analisis meliputi transparansi perencanaan dan pelaporan, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, kepatuhan terhadap regulasi, ketepatan waktu pelaporan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi. Sementara itu, pembangunan ekonomi lokal didefinisikan sebagai proses peningkatan kapasitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pemanfaatan Dana Desa, yang ditinjau dari pembangunan infrastruktur ekonomi, pengembangan BUMDes, dukungan terhadap usaha mikro dan kecil, serta peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data

sesuai dengan tujuan penelitian. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik untuk memudahkan pemahaman pola hubungan antar-temuan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap berdasarkan temuan di lapangan dan diverifikasi melalui triangulasi sumber serta teknik member check guna menjamin kredibilitas dan keabsahan data. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai peran akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sebagai instrumen peningkatan pembangunan ekonomi lokal di Desa Sondo.

HASIL

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Pemerintah Desa Sondo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sondo telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, tingkat implementasi akuntabilitas dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan hasil analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa

No	Indikator Akuntabilitas	Temuan Lapangan	Kategori
1	Transparansi	Informasi APBDes dipasang di papan informasi desa dan disampaikan saat musyawarah	Baik
2	Partisipasi	Masyarakat dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes)	Cukup Baik
3	Kepatuhan Regulasi	Pengelolaan sesuai tahapan peraturan perundang-undangan	Baik
4	Pelaporan dan Administrasi	Laporan realisasi disusun tepat waktu	Baik
5	Pengawasan	Pengawasan internal oleh BPD berjalan, namun partisipasi pengawasan masyarakat masih terbatas	Cukup Baik

Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sondo secara umum berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Proses administrasi dan dokumentasi kegiatan dinilai telah berjalan secara tertib dan sistematis, serta didukung oleh penyusunan laporan yang relatif transparan dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya komitmen aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan, khususnya pada aspek pengawasan partisipatif masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses monitoring dan

evaluasi penggunaan Dana Desa belum sepenuhnya optimal, baik dari segi intensitas keikutsertaan maupun kualitas partisipasinya. Beberapa warga masih bersifat pasif dan cenderung menyerahkan sepenuhnya proses pengawasan kepada pemerintah desa atau lembaga formal yang ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, sehingga pengelolaan Dana Desa tidak hanya akuntabel secara administratif, tetapi juga responsif dan partisipatif sesuai dengan prinsip *good governance*.

Dampak terhadap Pembangunan Ekonomi Lokal

Dana Desa di Desa Sondo dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa program yang teridentifikasi antara lain pembangunan jalan usaha tani, dukungan modal usaha kecil, serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Untuk memberikan gambaran perkembangan ekonomi lokal, berikut data deskriptif (berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi desa):

Tabel 2. Indikator perkembangan ekonomi lokal Desa Sondo

No.	Indikator	Sebelum Optimalisasi Akuntabilitas	Setelah Optimalisasi
1	Jumlah UMKM aktif	18 unit	27 unit
2	Infrastruktur jalan usaha tani	60% layak	85% layak
3	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi desa	Rendah	Meningkat
4	Pendapatan rata-rata pelaku usaha	Stabil	Meningkat

Berdasarkan data pada Tabel 2, terlihat adanya kecenderungan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat setelah pengelolaan Dana Desa Sondo dilaksanakan secara lebih transparan, akuntabel, dan terarah. Transparansi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, sehingga partisipasi warga dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi semakin meningkat. Selain itu, pengelolaan yang lebih terstruktur memungkinkan alokasi dana difokuskan pada program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap penguatan ekonomi lokal, seperti pengembangan usaha mikro, pembangunan infrastruktur pendukung distribusi hasil produksi, serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Dampak dari perbaikan tata kelola tersebut tidak hanya tercermin pada meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi produktif, tetapi juga pada bertambahnya peluang kerja dan perputaran ekonomi di tingkat desa.

DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sondo memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi lokal. Transparansi melalui publikasi APBDes dan laporan realisasi anggaran meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kompetensi aparatur desa dan komitmen organisasi juga mendukung akuntabilitas, namun transparansi secara langsung lebih kuat terkait dengan peningkatan kepercayaan masyarakat dibandingkan akuntabilitas (Merawati, 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini di perkuat dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan masyarakat, terutama ketika disertai dengan kinerja pemerintah desa yang baik sebagai variabel perantara (Husni et al., 2023; Suhardi et al., 2023).

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa juga berperan dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai kebutuhan lokal. Temuan ini mendukung teori akuntabilitas publik yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang berhak mengawasi dan menilai kinerja pemerintah desa. Partisipasi ini juga memperkuat prinsip akuntabilitas publik, di mana masyarakat berperan sebagai pengawas dan penilai kinerja pemerintah desa (Dama, 2023; Larasati et al., 2025; Rakhmawati & Wahyuni, 2022). Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif, program pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada kegiatan ekonomi produktif. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa, serta kualitas hasil pembangunan (Aritonang et al., 2025; Jatmikowati, 2024).

Dari sisi pembangunan ekonomi lokal, peningkatan jumlah UMKM dan perbaikan infrastruktur jalan usaha tani menunjukkan bahwa Dana Desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik semata, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai memperlancar distribusi hasil pertanian dan memperluas akses pasar. Infrastruktur yang memadai mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan BUMDes sebagai instrumen penting dalam sirkulasi ekonomi desa (Kamila et al., 2025; Manan & Aprilya, 2025). Penguatan BUMDes juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan sirkulasi ekonomi di tingkat desa. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pengawasan partisipatif masyarakat belum sepenuhnya optimal. Sebagian masyarakat masih memandang pengelolaan keuangan desa sebagai tanggung jawab aparat desa semata. Peningkatan literasi keuangan masyarakat dan penerapan transparansi

berbasis digital sangat diperlukan untuk memperkuat partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (Phoek et al., 2024). Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa merupakan faktor penting untuk mendorong keberhasilan pembangunan ekonomi lokal. Secara praktis, pemerintah desa perlu memperkuat transparansi, partisipasi masyarakat, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Pengelolaan yang akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, mendorong keterlibatan warga dalam pembangunan, serta memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar digunakan untuk program yang produktif dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan implikasi kebijakan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi sistem pengawasan, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa perlu terus ditingkatkan untuk mendukung terciptanya tata kelola yang baik. Dari sisi akademis, temuan ini memperkuat teori tata kelola publik yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan prasyarat utama dalam menciptakan efektivitas penggunaan sumber daya publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban administrasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sondo telah berjalan dengan kategori baik, terutama pada aspek transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta ketepatan pelaporan administrasi. Proses perencanaan melalui musyawarah desa dan publikasi informasi anggaran menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam menerapkan prinsip tata kelola yang akuntabel. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi lokal. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah usaha mikro yang aktif, perbaikan infrastruktur ekonomi seperti jalan usaha tani, serta penguatan peran BUMDes dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pengelolaan dana yang transparan dan partisipatif mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan program pembangunan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan. Namun demikian, aspek pengawasan partisipatif masyarakat masih perlu diperkuat agar akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan

berkelanjutan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa merupakan instrumen strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal, khususnya di Desa Sondo, apabila dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Meskipun penelitian ini berhasil memberikan gambaran mengenai pengaruh akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan ekonomi lokal di Desa Sondo, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada satu desa sehingga hasil yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh desa yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan tata kelola yang berbeda. Kedua, pengukuran akuntabilitas dan pembangunan ekonomi lokal sebagian besar didasarkan pada persepsi responden melalui kuesioner, sehingga masih terdapat kemungkinan adanya subjektivitas dalam penilaian yang diberikan. Ketiga, penelitian ini hanya memfokuskan pada variabel akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, sementara pembangunan ekonomi lokal juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti kualitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur, dukungan kebijakan pemerintah daerah, akses permodalan, serta kondisi pasar yang tidak dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini. Keempat, penelitian menggunakan pendekatan pada periode waktu tertentu (*cross-sectional*) sehingga belum mampu menggambarkan perubahan dan dampak jangka panjang dari pengelolaan Dana Desa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, menggunakan pendekatan longitudinal, serta menambahkan variabel-variabel lain yang relevan agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi lokal melalui pengelolaan Dana Desa.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan agar pemerintah Desa Sondo terus memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui peningkatan transparansi, pengawasan partisipatif, dan penguatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan serta pelaporan administratif yang sesuai regulasi. Transparansi dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan media informasi digital maupun publikasi rutin laporan keuangan agar akses masyarakat terhadap informasi semakin terbuka dan mendorong meningkatnya kepercayaan publik. Selain itu, pengawasan partisipatif perlu diperluas dengan melibatkan masyarakat secara aktif tidak hanya pada tahap perencanaan melalui musyawarah desa, tetapi juga dalam pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan sehingga akuntabilitas yang terbangun tidak semata bersifat administratif, melainkan substantif dan berkelanjutan.

Pemerintah desa juga perlu mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal melalui pengembangan unit usaha berbasis potensi desa dan pemberdayaan usaha mikro masyarakat. Bagi pemangku kebijakan, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan penguatan tata kelola dana desa yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada pembangunan ekonomi lokal. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan pendekatan metodologis yang lebih beragam, seperti mixed methods atau analisis komparatif antardesa, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara akuntabilitas pengelolaan dana desa dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Apresiasi juga diberikan kepada pihak pemerintah Desa Sondo beserta seluruh informan yang telah bersedia memberikan data, informasi, dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak pendukung pendanaan (jika ada) yang telah membantu dalam pembiayaan penelitian ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Tidak lupa, penulis juga menghargai kontribusi berbagai pihak lain yang turut membantu, seperti rekan sejawat, proofreader, pengetik, serta pihak-pihak yang telah menyediakan data maupun materi pendukung penelitian. Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

REFERENSI

- Achmad, M., & Suwanda, D. (2024). Efektivitas Penggunaan Dana Desa terhadap Pengembangan Infrastruktur Desa dan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi: Studi Kasus Desa Karang Satria. 4(2), 497–513.
- Aritonang, A. M., Pasaribu, E. S., & Siburian, P. R. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. 262–268.
- Bahri, S. (2020). Analisis Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Ekonomi Masyarakat Desa di Indonesia. 5(2).
- Dama, F. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat. 2(2), 64–71.
- Dwirini, D., Rahmawati, M., & Abukosim, A. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Pengungkapan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Dana terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 19(4), 559-568.

- Gobel, Y. P. (2022). Implementasi Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Kinerja Perekonomian Daerah di Indonesia. 1(1), 61–71.
- Husni, M., Damayanti, R. A., & Indrijawati, A. (2023). The Role of the Village Government Performance and Transparency in Influencing Village Public Trust. 24(2). <https://doi.org/10.18196/jai.v24i2.17114>
- Jatmikowati, S. H. (2024). Community Participation in Village Development. 5(6), 124–145. <https://doi.org/10.47505/IJRSS.2024.6.10>
- Jumsar, M., Qadar, J., & Burhanuddin, B. (2025). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lattimu Kecamatan Bola Kabupaten Wajo.
- Kamila, N. F., Wardana, R. S., Fauzan, R., & Pangestoeti, W. (2025). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. 3(6), 178–190.
- Kamila, S. A., Suliswanto, M. S. W., & Sari, N. P. (2021). Pengaruh Dana Desa, Pengangguran dan Pendidikan terhadap Kondisi Kemiskinan di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa. *Lensa Ekonomi*, 15(01), 50-63.
- Karundeng, T. M., Runtu, T., & Lintong, D. N. (2025). Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa di Desa Rumong Atas Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. 3(13), 501–509. <https://doi.org/10.58784/rapi.377>
- Koriyawati., Sholicah, N., Widyawati., & Patrija, W. D. (2025). Evaluasi Program Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lebeteng Kec. Tarub Kab. Tegal. *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 48–65. <https://doi.org/10.61132/sadewa.v3i3.1956>
- Larasati, M., Sari, W. P., & Pane, A. A. (2025). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(2), 150–160. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i2.4291>
- Manan, A. A., & Aprilya, I. (2025). The Impact of Village Funds on the Indonesian Economy: Expansion and Progress. 6(September), 227–237.
- Merawati, L. K. (2024). Transparency and Community Trust in Village Government: Does Corruption Perception Matter? *Social and Environmental Accountability Journal*, 44(15), 262–263. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/0969160x.2024.2400843>.
- Phoek, I., Bhaumik, A., Phoek, I., Bhaumik, A., Isaac, O., & How, A. T. (2024). How Village Funds Influence Economic Development in South Papua, Indonesia. [https://doi.org/10.21511/ppm.22\(1\).2024.26](https://doi.org/10.21511/ppm.22(1).2024.26)
- Rakhmawati, H., & Wahyuni, N. D. (2022). Influence of Accountability of Village Fund Allocation Management and Community Participation on Village Development. August, 208–215.
- Sanur, D. (2023). Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No . 6 Tahun 2014 tentang Desa. 14(6), 1–21. <https://doi.org/10.22212/jp.v14i1.4120>
- Sugito, W., Ardiansah, & Fahmi, S. (2002). Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hilir. 111–122.
- Suhardi, U. U., Pribadi, U., & Losi, Z. (2023). The Effects of Good Governance Principles: Accountability, Transparency, and Participation on Public Trust in Village Funds Management. 7(4), 1050–1060.
- Sutanto, H., & Hardiningsih, P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 Accountability of The BLT-Village Fund Management During the Covid-19 Pandemic. 17(1), 1–10.

- Warokka, A., Warokka, V., & Aqmar, A. Z. (2025). Financing Rural Futures: Governance and Contextual Challenges of Village Fund Management in Underdeveloped Regions. 1–23.
- Wea, A., & Rahmadhani, S. (2025). Kinerja Pengelolaan Dana Desa: Dampak Partisipasi, Evaluasi Anggaran, dan Kejelasan Tujuan. 9(April), 726–737.
- Wulandari, M., Mawardani, P., Rohman, Z., & Hayati, S. (2025). Evaluasi penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan: Studi kasus di Provinsi Lampung. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 3752-3763.
- Wulandari, S. Z., & Malau, H. (2025). The Challenges in Village Fund Management in Enhancing Infrastructure Development and Community Empowerment in Nagari Muara. 4(6), 2439–2446.